

STRATEGI RUSIA MENGHADAPI EMBARGO AS PASCA KRISIS KRIMEA TAHUN 2014

Daru Lestika Susilo Handayani

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

tikalestika@gmail.com

Abstrak :

Penulisan paper ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Rusia menghadapi embargo yang di berikan AS pasca krisis Krimea tahun 2014. Pasca diembargo oleh AS perekonomian Rusia semakin melemah dengan nilai tukar 37 rubel setara dengan 1 dolar AS, hal ini di perparah dengan naiknya harga minyak dunia. Melemahnya sector ekonomi Rusia ini memaksa Rusia untuk menerapkan berbagai strategi guna menaikkan perekonomiannya sekaligus membalas sanksi yang telah di berikan oleh AS tersebut. Strategi yang diterapkan oleh Rusia untuk mengatasi persoalan tersebut di bagi menjadi dua bentuk strategi, yaitu menerapkan kebijakan di dalam sector negerinya sendiri dan memberlakukan kebijakan dalam sector luar negerinya yaitu dengan melakukan kerjasama dengan negara yang tidak turut mengembargonya.

Kata kunci : Krisis Krimea, Embargo AS, Strategi, Kerjasama.

PENDAHULUAN :

Krimea merupakan sebuah semenanjung yang terletak di bagian timur, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Hitam, sebelah utaranya berhungungan dengan Ukraina, sedangkan di sebelah timur semenanjung ini hampir menyambung dengan daratan Rusia. Secara de juree (hukum) Krimea merupakan wilayah dari negara Ukraina, namun secara darah keturunan wilayah ini sangat erat hubungannya dengan Rusia, karena sekitar 60 persen dari total penduduk Krimea berdarah Rusia.

Rusia pernah menguasai Krimea pada abad ke - 18 sampai abad ke – 20. Pada tanggal 19 Februari 1954, Presidium tertinggi Uni Soviet mengeluarkan dekrit yang menyerahkan Krimea kepada Ukraina sebagai hadiah menandai 300 tahun Ukraina menjadi bagian dari Kekaisaran

Rusia. Saat Uni Soviet runtuh pada tahun 1991 tersebut, baik Rusia maupun Ukraina sama – sama menginginkan Krimea. Namun pada Desember 1991, Rakyat Krimea memilih untuk bergabung dengan Ukraina. Setahun kemudian, 1992, para politisi pro Rusia di Krimea berkampanye menginginkan bergabung dengan Rusia, kemudian masalah ini dapat diakhiri pada tahun 1997 dengan ratifikasi Kesepakatan Persahabatan, Kerjasama, dan Kemitraan, yang menegaskan Moskow mengakui integrasi wilayah dan perbatasan Ukraina. (Kuncahyono, 2014)

Kisruh di Ukraina bermula pada 21 November 2013 setelah seruan demonstrasi yang meminta integrasi yang lebih erat dengan Uni Eropa meluap. Hingga seruan demonstrasi ini meluas menjadi seruan agar Presiden Ukraina Viktor Yanukovich dan pemerintahannya mengundurkan diri dari jabatannya (Balmforth, 2013). Hal tersebut dikarenakan Presiden Victor Yanukovich dalam setiap kebijakannya lebih cenderung pro terhadap Rusia, diantaranya ialah pada tanggal 21 April 2010 Victor Yanukovich menandatangani perjanjian Naval Base yang isinya Rusia dapat memperpanjang sewa Sevastopo yang merupakan pangkalan Angkatan Laut Rusia yang berada di Krimea, sepanjang 25 tahun kedepan sampai tahun 2024, dan tambahan ekstra 5 tahun, sampai 2047, dengan imbalan Ukraina mendapatkan kontrak multi diskon dalam pembelian gas alam Rusia. Puncak kemarahan masyarakat Kiev ketika pada tanggal 17 Desember 2010 Victor Yanukovich menandatangani dana talangan sebesar US\$ 15 miliar dari Rusia, untuk menanggulangi krisis ekonomi di eropa, dan mengabaikan Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa yang akan dilakukan di Eastern Partnership Summit di Vilnius, Lithuania.

Pasca digulingkannya Presiden pro Rusia Victor Ynukovich, Presiden Rusia, Valdimir Putin mengambil langkah gesit dengan menuntut persetujuan Parlemen Rusia untuk menginvasi Ukraina dan pada tanggal 1 Maret 2014 Putin berhasil mendapat persetujuan Parlemen, Rusia melakukan maneuver militer dengan menerjunkan ribuan tentara ke wilayah otonom Krimea. Manuver ini langsung dikecam oleh Barat. Barat menganggap langkah Rusia tersebut sebagai agresi atas kedaulatan sah Ukraina dan melanggar hukum internasional. (Maghris, 2014)

Mayarakat pro Rusia di Krimea menuntut untuk dilakukannya referendum. Sebanyak 1,5 juta rakyat Krimea mengikuti referendum untuk menentukan masa depan mereka, pada tanggal 16 Maret 2014, rakyat Krimea diberi dua opsi dalam referendum itu, yakni bergabung dengan Rusia atau tetap bersama Ukraina, namun dengan otonomi luas. Hasil dari referendum tersebut

menyebutkan 70 persen warga Krimea ingin bergabung dengan Rusia, dan 11 persen menginginkan tetap bergabung kedalam kedaulatan Ukraina.

Keputusan referendum tersebut dianggap sebagai sebuah keputusan yang illegal, dan dianggap sebagai sebuah upaya aneksasi yang dilakukan oleh Rusia. Banyak negara yang tidak mengakui bahkan mengecam hasil referendum tersebut, namun Valdimir Putin tidak gentar bahkan ia tetap menandatangani undang - undang yang mengesahkan Crimea sebagai bagian dari Rusia.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling menentang hasil refrenfum tersebut, sebagai bentuk ketidak setujuan Amerika Serikat terhadap referendum yang di nilai illegal tersebut Amerika Serikat memberikan sanksi berupa embargo ekonomi kepada Rusia, dengan maksud untuk melemahkan Rusia dari sector ekonominya, bahkan Amerika Serikat menggandeng Uni Eropa dengan maksud untuk mempersempit mitra dagang Rusia, yang mana Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar Rusia, maka dengan demikian Rusia akan kehilangan pasarnya di Uni Eropa.

Embargo yang di berikan oleh Amerika Serikat ke Rusia tersebut berupa : Larangan Visa dan Pembekuan Aset bagi pejabat dan pengusaha Rusia, serta bagi perusahaan – perusahaan milik Rusia, embargo di sector Sanksi di sector financial, industri dan pertahanan Rusia, serta di keluarkannya Rusia dari keanggota G-8.

Rusia pun pada akhirnya harus membayar mahal upaya agresinya tersebut dengan rontoknya nilai mata uang rubel terhadap euro dan dolar sebagai akibat dari embargo ekonomi tersebut. Untuk pertama kalinya rubel turun dibawah 50 rubel terhadap euro, dengan 51,20 rubel setara dengan 1 euro, kemerosotan nilai tukar pun terjadi pada nilai tukar rubel pada dollar AS dimana nilai 37 rubel setara dengan 1 dollar AS. (Kompas, 2014)

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori strategi untuk menganalisa persoalan yang terjadi di Krimea pada tahun 2014 tersebut. Strategi dalam politik luar negeri merupakan sebuah perencanaan yang di buat oleh para pembuat keputusan guna mencapai kepentingan

nasionalnya dengan di barengi usaha mencegah negara lain menghalai pencapaian kepentingan nasionalnya tersebut. Teori strategis akan dinilai berhasil atau pun gagal bila mampu membantu pembuat keputusan merumuskan sebuah strategi guna memenuhi kepentingan nasionalnya tersebut.

John P Lovell membagi strategi atas dua komponen yaitu komponen ofensif (bentuk untuk mendapatkan perolehan dan keuntungan) dan komponen defensif (bentuk untuk mencegah kehilangan atau kerugian). Teori strategi didasarkan atas pertimbangan pembuat keputusan dalam rangka memperhitungkan untung dan rugi dalam pencapaian tujuan strategi itu sendiri. Serta menurut John P. Lovell, strategi adalah serangkaian langkah - langkah atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya dalam situasi kompetitif dimana hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan. (Mas' oed, 1989)

Referendum Krimea pada yang dilaksanakan pada Februari tahun 2014 tersebut menghasilkan keputusan Krimea bergabung kedalam kedaulatan Rusia, dengan perolehan 70 persen warga Krimea ingin bergabung dengan Rusia, dan 11 persen menginginkan tetap bergabungkedalam kedaulatan Ukraina. Namuan hasil referendum tersebut tidak diakui oleh dunia internasional, malah justru menuai banyak sanksi, salah satunya embargo Amerika Serikat kepada Rusia maupun Krimea. Sanksi yang di jatuhkan oleh Amerika Serikat bersama sekutunya tersebut sontak melemahkan perekonomian Rusia, di buktikan dengan rontoknya nilai dolar akibat embargo tersebut. Pemerintah Rusia dengan pertimbangan yang matang memutuskan untuk menjalin kerjasama ekonomi dengan negara yang tidak turut serta mengembargonya, sebagai sesuatu langkah strateginya guna menyelamatkan perekonomiannya yang hampir jatuh akibat embargo tersebut.

PEMBAHASAN :

1. KRISIS KRIMEA

Krisis Krimea bermula ketika masyarakat Kiev yang muali geram akibat kebijakan Presiden Ukraina Victor Yanukovych yang cenderung terliha pro terhadap Rusia, sampai pada pembatalan Perjanjian Asosiasi Ukraina – Uni Eropa yang menuai banyak protes dari masyarakat dan berujung pada demonstrasi meminta dilengserkannya Victor Yanukovych. Lengsernya Victor Yanukovych ini justru semakin memanasakan kondisi di Ukraina, hingga masuknya Rusia dan pihak barat dalam konflik ini.

Republik Otonomi Crimea atau Krimea terletak di sebelah selatan Ukraina tepatnya di Semenanjung Krimea yang memiliki luas wilayah 26.100 km persegi. Ibu kota Krimea terletak di Simferopol, dan beberapa kota utama yang ada di wilayah Krimea adalah Feodosia, Kerch, Sevastopol, Simferopol, Sudak, Yalta, dan Yevpatoria. Wilayah Krimea dihuni oleh 3 etnik utama yaitu Rusia (59%), Ukraina (20%), Tatar Krimea (15%) dan sisanya etnik lain (6%). (Public Opinion Survey Residents of the Autonomous Republic of Crimea, 2013) memiliki jumlah penduduk sebesar 2,4 juta jiwa. menurut sensus penduduk tahun 2001, bahasa – bahasa yang sering di gunakan di Krimea adalah Russian 77%, Krimtataars (termasuk kelompok bahasa Turki) 11,4% dan Ukraina 10.1 %. (General Language Crimea, 2001)

Lebih dari 50 persen ekonomi Krimea dikhususkan untuk industri produksi pangan dan distribusi, dengan produk pertanian utamanya berupa biji-bijian, sayuran dan anggur. terutama terdapat di wilayah Yalta dan Massandra. Sumber alam lain yang dihasilkan di Semenanjung Krimea meliputi garam, batu mulia, batu kapur dan pasir besi, di sector pertentakannya Krimea merupakan wilayah pemeliharaan ternak sapi, ayam dan domba. Selain itu sektor pariwisata juga memegang peranan penting dalam perekonomian Krimea. Kota Yalta adalah tempat tujuan wisata yang terkenal di Laut Hitam bagi orang-orang Rusia, demikian juga dengan Alushta, Eupatoria, Saki, Feodosia dan Sudak.

Krimea memiliki badan legislatif sendiri (Dewan Tertinggi Krimea beranggotan 100 wakil rakyat) dan kekuasaan eksekutif yang dipegang Dewan Menteri yang dipimpin seorang ketua yang berkuasa atas persetujuan Presiden Ukraina. Pengadilan adalah bagian dari sistem peradilan Ukraina dan tidak memiliki otoritas otonom. (Krimea, 2014)

1.1 SEJARAH HUBUNGAN RUSIA DAN KRIMEA :

Krimea jatuh ketangan Rusia pada tahun 1783, pada saat itu Krimea berada di bawah kekuasaan Khanate Krimea, yang mendirikan sebuah dinasti yang diperintah oleh Khanate pada paruh pertama abad ke-15 dan terus berlangsung sampai 1783. Pada tahun 1475 Khanate Krimea membentuk aliansi dengan Khalifah Utsmani untuk memrebut sebageian wilayahnya dari Genoa yang telah menduduki sebagian wilayah Krimea.

Abad ke 17 dan 18 Khanate Krimea mulai kehilangan kekuatannya akibat ketidak stabilan domestic, begitu pula Khilafah Utsmani yang kehilangan kekuatan di Eropa, malah sebaliknya Rusia yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Chatherine II justru mendapatkan

kekuasaannya, ia memiliki kepentingan untuk mendapatkan akses ke Laut Hitam dan, mengeksploitasi ketidak stabilan internal dan tahun 1774 memaksa khan untuk tunduk di bawah pengaruhnya; dan kemudian pada tahun 1783, Krimea dianeksasi oleh kekaisaran Rusia. (Davydov, 2008) Sistem administrasi Khanate pun kemudian digantikan dengan sistem administrasi yang di gunakan dalam kekaisaran Rusia pada saat itu.

Krimea dijadikan sebagai tempat untuk beradu kekuasaan bagi kelompok – kelompok yang berkepentingan pada perang Saudara di Rusia pada tahun 1918-1921, setelah penggulingan Kekaisaran Rusia dalam perang saudara tersebut, Krimea berpindah tangan sempat berada di bawah benteng Tentara Putih anti - Bolshevik yang dipimpin oleh Jenderal Wrangel, melawan kekuatan Anarkis Nestor Makhno dan Tentara Merah pada tahun 1920 . Baik Bolshevik maupun tentara putih menginginkan Krimea untuk bersatu di bawah kekuasaan mereka. Pada tahun 1920 Krimea berhasil menduduki Krimea.

Krimea menerima status Otonom Krimea Republik Soviet (Crimean ASSR) diciptakan secara resmi sebagai bagian dari Republik Federasi Sosialis Rusia (RSFR) pada tanggal 18 Oktober 1921. Namun otonomi tersebut bersifat terbatas, Rusia tetap mengambil tanggung jawab atas sebagian besar kegiatan di Krimea. Sevastopol dan Evpatoria merupakan daerah yang mendapat pengecualian, kedua daerah ini keluar dari yuridiksi Krimea dan pengaturannya langsung di bawah Moskow. Pada tanggal 30 Juni 1945 Krimea ASSR di ubah menjadi Oblast Krimea bagian dari RSFR, kemudian pada tanggal 19 Februari 1954 Krimea dipindahkan ke dalam yuridiksi Ukraina SSR, karena kedekatan hubungan geografis, ekonomi, dan budaya antara RSFR dan Ukraina SSR, serta di tujukan sebagai symbol persahabatan yang menandai ulang tahun ke – 300 dari penggabungan Ukraina SSR dan kekaisaran Rusia.

1.2 KRISIS KRIMEA TAHUN 2014 :

Krisis Krimea bermula ketika pada tanggal 21 November 2013, Victor Yanukovych secara tiba-tiba mengumumkan penundaan pembicaraan Perjanjian Asosiasi dan Perdagangan dengan Uni Eropa, demi membangun hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Rusia. Keputusan ini pun menuai protes besar - besaran dari masyarakat Ukraina. Barikade pun kembali ke Independence Square di Kiev, yang dikenal sebagai Maidan Square, di mana sekitar 200 ribu orang berkumpul pada hari Minggu dalam sebuah unjuk rasa pro-Eropa untuk menuntut pengunduran diri Presiden Viktor Yanukovych, namun para pendukung Yanukovych menggelar

unjuk rasa tandingan tak jauh dari sana di Mariinsky Park. (Ketika Ukraina Harus Memilih Antara Rusia dan Uni Eropa, 2014)

Masa pendukung Rusia melakukan demonstrasi balasan terhadap demonstrasi yang menyuarakan untuk digulingkannya presiden pro Rusia Victor Yanukovich, pada tanggal 21 Februari 2014 masa pendukung Rusia menduduki dan menguasai kantor – kantor pemerintah Ukraina di Donetsk dan di Mariupol ratusan demonstrasi mengusung bendera Rusia berkumpul di depan Dewan Kota di wilayah Timur dan Selatan Ukraina. Pada 22 Februari 2014 mereka juga menduduki Pangkalan Angkatan Laut Ukraina di Novofedorovka, yang di barengi pendudukan Rusia atas Pangkalan Militer Balbek milik Ukraina di Krimea dengan menggunakan menggunakan kendaraan lapis baja. Rusia juga nampak mengirimkan tank – tanknya di kota Balacalva, Krimea. Akibat dari konflik yang berkepanjangan di Ukraina, Parlemen Ukraina memutuskan untuk mengadakan pungutan suara pada 22 Februari 2014 untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Yanukovich. Pada 26 Februari 2014 parlemen Ukraina menunjuk memilih Oleksander Turchinov menjadi presiden sementara Ukraina, sedangkan Viktor Yanukovich sehari setelah di gulingkan oleh parlemen memilih melarikan diri ke Rusia.

Pada 28 Februari 2014, sejumlah orang bersenjata menduduki gedung, parlemen kemudian mengadakan sidang darurat, dan melakukan pemungutan suara untuk mengakhiri pemerintah Krimea, dalam sidang tersebut juga memutuskan untuk menggantikan Perdana Menteri Antolii Mohylov dengan Sergey Aksyonov. Aksyonov sendiri merupakan anggota Partai Persatuan Rusia yang menerima 4% suara dalam pemilu terakhir. Dalam sidang ini juga diajukan keputusan untuk dilakukannya referendum tentang otonomi yang lebih besar pada tanggal 25 Mei 2014.

Referendum yang awalnya akan dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 2014 diajukan menjadi tanggal 16 Maret 2014. Referendum tersebut di pantau oleh 135 observer yang berasal dari 23 negara, yang diantaranya berasal dari negara Australia, Belgia, Italia, Latvia, Jerman dan Prancis. Sedangkan observer lokal berjumlah sekitar 1.240 orang. Rakyat Krimea diberi dua opsi dalam referendum tersebut, yakni bergabung dengan Rusia atau tetap bersama Ukraina, namun dengan otonomi luas. Hasil referendum tersebut menunjukkan 70 % warga Krimea menginginkan bergabung dengan Rusia sementara hanya 11% yang memilih bergabung dengan Ukraina. Hasil referendum ini pun dianggap sebagai suatu keputusan ilegal, masyarakat internasional pun

tidak mengakui hasil referendum tersebut. Protes keras pun datang dari Amerika Serikat. Namun Valdimir Putin tetap menandatangani Undang – undang yang menyatakan Krimea bergabung kedalam Rusia pada 21 Maret 2014.

2. INTERVENSI RUSIA DAN AS DALAM KRISIS KRIMEA :

Rusia dengan dalih ingin melindungi warga keturunan Rusia yang berada di Krimea turut campur tangan dalam konflik tersebut. Etnis Rusia mendominasi jumlah penduduk di Krimea sebesar 70% penduduk, mereka ini lah yang menyuarakan untuk di selamatkan oleh Rusia. Pada Februari 2014 terjadi demonstrasi yang menginginkan Rusia untuk mengirim pasukannya guna melindungi etnis Rusia yang ada disana, seperti saat Moskow memerangi Georgia dan berhasil menyelamatkan South Ossetia serta Abkhazia tahun 2008. Kendati demikian, dalih melindungi etnis Rusia di Krimea tetap saja tidak dapat di terima secara hukum internasional, Rusia dianggap melanggar prinsip penghormatan terhadap kedaulatan yang di junjung tinggi sebagai prinsip dan norma hubungan antar negara.

Aksi aneksasi Rusia terhadap Krimea tersebut telah dianggap melanggar Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa dan Traktat Persahabatan dan Kerjasama yang di tanda tanganni dengan Ukraina pada tanggal 31 Mei 1997. Serta Rusia melanggar Momerandum Perjanjian Jaminan Keamanan ditandatangani di Budapest pada tahun 1994 oleh Ukraina, Amerika Serikat, Inggris dan Rusia. Mewajibkan bagi negara – negara tersebut untuk melindungi wilayah Ukraina dan kedaulatannya setelah senjata nuklir Soviet yang berada di Ukraina dipindahkan.

Intervensi Rusia pada krisis Krimea ini membuktikan bahwa Krimea memiliki daya tarik bagi Rusia, terlepas dalih Rusia ingin menyelamatkan warga Krimea yang beretnis Rusia. Rusia terlihat begitu menginginkan Krimea menjadi bagian dari negranya, begitu pula dengan etnis Rusia yang ada di Krimea.

2.1 ARTI PENTING RUSIA BAGI KRIMEA :

- a. Melindungi etnis Rusia di Krimea, dimasa hampir 60% rakyat Krimea beretnis Rusia, dari mereka puluh lah Rusia mendapatkan di kungan di wilayah Ukraina.

- b. Posisi strategis Krimea, wilayah Krimea di hampir seluruhnya dikelilingi oleh laut hitam dan tergabung dengan daratan Ukraina melalui daerah tanah genting Periskop. Serta jalur pipa bawah tanah di Krimea untuk menyalurkan gas alam Rusia keseluruh wilayah eropa.
- c. Pangkalan Angkatan Laut Rusia, di Sevastopol, Krimea, dengan dimilikinya wilayah Sevastopol maka Rusia tidak perlu menyewa pangkalan laut tersebut lagi, yang mana uang sewa atas wilayah ini senilai US\$ 98 juta setahun, dan dengan dimilikinya wilayah Krimea, Rusia tidak perlu khawatir kehilangan sewa atas pangkalan lautnya tersebut, bila suatu saat berkonflik dengan Ukraina kembali.
- d. Menunjukkan kekuatan Rusia, pasca Runtuhnya Uni Soviet NATO mulai melakukan perluasan hingga ke wilayah pecahan Uni Soviet. Rusia mengecam tindakan tersebut dan menilai tindakan AS akan merusak tatanan geo politik dunia.

2.2 Intervensi AS dalam Krisis Krimea :

Ketidak mampuan pemerintah Ukraina menyelesaikan konflik di wilayahnya tersebut, memaksa ia meminta bantuan kepada Amerika Serikat dan Inggris sebagai langkah antisipasi terhadap tindakan Rusia yang terus mengirimkan pasukannya ke Ukraina. (Document Security Council No. SC/11302, 2014). Amerika Serikat, Rusia dan Inggris pernah menandatangani kesepakatan Budapest pada 1994 yang isinya adalah jaminan akan kedaulatan wilayah Ukraina dari segala ancaman yang mungkin akan diterima Ukraina. Karena itu, Presiden Barack Obama di AS saat ini mendapat tekanan yang kuat dari oposisi Partai Republik. Mereka meminta Obama melaksanakan perjanjian yang telah dibuat bersama dengan Ukraina. (Krimea K. S., 2014)

Amerika Serikat mengajukan resolusi ke PBB atas hasil referendum tersebut, Majelis Umum PBB pun menyetujui resolusi Amerika Serikat tersebut. Mayoritas anggota PBB tidak mengakui hasil referendum Krimea tersebut, dan menyebut bergabungnya Krimea ke Rusia adalah illegal. Hasil pemungutan suara menyatakan 100 negara mendukung resolusi, 11 negara menentang dan 58 negara abstain. Amerika Serikat juga meminta *Organization For Security and Co – opration in Europe (OSCE)*, Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa untuk mengirimkan misi pemantauan ke Ukraina. (OSCE Sending Military Observer Mission to Ukraine, 2014). Misi tersebut bertujuan untuk memantau konflik, menjamin perlindungan hak asasi anggota kelompok minoritas, mencegah konflik perbatasan, mempromosikan

penghormatan terhadap integrasi territorial, dan memelihara perdamaian, stabilitas, serta keamanan Ukraina terutama Krimea. (Organization For Security and Cooperation in Europe, “OSCE respons to crisis in and around Ukraine, 2014) Namun berakhir tanpa kesepakatan dan tetap menuai jalan buntu.

Amerika Serikat berusaha melindungi kedaulatan Ukraina atas gempuran yang terus dilakukan oleh Rusia dalam upayanya mengintervensi Krimea dan pasca pengumuman Refrendum Krimea, dengan cara sebagai berikut :

- a. Membangun pertahanan militer di Eropa Timur. Pada 22 Februari 2014, Amerika Serikat mengirimkan Kapal perang USSR Truxton serta memperbanyak pengiriman pesawat tempur ke kawasan Baltik guna bergabung dengan NATO (North Atlantic Treaty Organization) yang sedang melakukan latihan bersama di Polandia dan Rumania, dan NATO akan mengirimkan tambahan kapal, pesawat dan pasukan ke Eropa Timur. Amerika Serikat juga memberikan bantuan non – militer ke Ukraina senilai 70 juta AS, diantaranya berupa : jatah makanan, radio, kawat berduri, kotak pertolongan pertama, dan perlengkapan terbatas pelindung tubuh.
- b. Latihan Militer Ukraina dan AS. Pada tanggal 16 – 23 Mei 2014 diadakan latihan militer bersama di Estonia dengan Kode Rip Trident, latihan bersama yang dilakukan bersama NATO dan Amerika Serikat tersebut diikuti oleh beberapa negara Eropa Tengah dan Timur, di antaranya Belgia, Denmark, Estonia, Prancis, Litvia, Lithuania Polandia, Inggris, dan Ukraina. Pada September 2014 latihan militer utama dilakukan di Ukraina, dalam latihan bersama tersebut diikuti oleh 17 negara, diantaranya negara anggota NATO. Krimea ini NATO mengirimkan bantuan dengan memberikan bantuan militer berupa senjata dari lima anggota NATO, yaitu : Amerika Serikat, Prancis, Italia, Polandia, dan Norwegia.

2.3 Sanksi AS pada Rusia :

- a. Rusia dikeluarkan dari anggota G-8, sebagai konsekuensi yang harus diterima Rusia atas aneksasi yang ia lakukan di Krimea. Kelompok anggota G-7 pun memboikot KTT G-8 yang awalnya akan dilaksanakan di Sochi, Rusia pada Juni 2014. Kelompok G-7 malah justru melakukan pertemuan di Brussels, Belgia. Pada tanggal 26 Maret 2014, Amerika Serikat bersama dengan Uni Eropa juga membicarakan langkah yang akan mereka lakukan untuk mempengaruhi perekonomian Rusia, G-7 juga melakukan

pertemuan di Den Haag, Belanda yang juga membahas tentang pendudukan Rusia di Krimea.

- b. Sanksi di sector financial, industri dan pertahanan Rusia. Sanksi finansial Amerika Serikat tersebut berlaku untuk tiga bank negara Rusia yang terbesar, yakni VTB (60,9 persen saham dimiliki pemerintah Rusia), Bank of Moscow (95,52 persen saham dimiliki VTB), dan Bank Pertanian Rusia (100 persen saham dimiliki pemerintah Rusia). perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dilarang memberi pinjaman lebih dari 90 hari untuk bank-bank tersebut dan institusi yang terkait. Selain bank, pembatasan juga diberlakukan terhadap United Shipbuilding Corporation, perusahaan induk Rusia yang melaksanakan 80 persen proyek pembuatan kapal di Rusia termasuk untuk militer, juga terkena sanksi. (Dampak Sanksi Baru Bagi Bank Rusia, 2014) Larangan bagi perusahaan energy milik Rusia menggunakan barang, jasa, dan teknologi dari Amerika Serikat pada proyek-proyek yang melibatkan pengeboran lepas pantai Arktik. Amerika Serikat juga memberikan sanksi kepada beberapa perusahaan milik Rusia, diantaranya: Avia Group Limited, Severny Morsoy Bank, InvestCapital Bank, Transoil, Volga Resources Group, SMP Bank, Sobin Bank dan Zest Leasing, dan perusahaan milik Pemerintah seperti Rosneft.
- c. Larangan Visa dan pembekuan Aset, bagi Putin dan orang – orang terdekatnya, serta larangan visa dan pembekuan aset dikenakan pada para pengusaha Rusia. Berikut ini beberapa nama pejabat yang di berikan sanksi pembekuan aset dan larangan visa : Sergey Valeryevich Aksyonov, Vladimir Andreevich Konstantinov, Rustam Ilmirovich Temirgaliev, Deniz Valentinovich Berezovskiy, Aleksei Mikhailovich Chaliy Pyotr, Anatoliyovych Zima, Sergey Pavlovych Tsekov, Ozerov Viktor Alekseevicha. (EU sanctions list includes Russian commanders, Crimea PM, Reuters, 2013)

3. STRATEGI RUSIA MENGHADAPI EMBARGO AS :

Perebutan pengaruh Timur dan Barat dalam kasus Ukraina menimbulkan gejolak di pasar keuangan Rusia. Sejak angkatan bersenjata Rusia menduduki Crimea pada 28 Februari 2014, indeks saham Moscow turun drastis ke level terendah, dan ditengarai sekitar 50 perusahaan mengalami kerugian senilai USD110 miliar. Nilai tukar Rubel terhadap dolar AS juga terdepresiasi cukup dalam yaitu sekitar 10% dibandingkan posisi awal tahun 2014. Sejalan

dengan itu, *capital outflow* (modal keluar) diperkirakan mencapai USD70 miliar pada kuartal 1-2014 dan berpotensi menyebabkan Rusia mengalami resesi akibat menurunnya permintaan domestik dan ketidakpastian kondisi keuangan. Sebelum merebaknya krisis Ukraina, pekonomi Rusia telah mengalami masalah pertumbuhan ekonomi rendah sejak tahun 2009. PDB periode TW3-13 hanya tumbuh 1,2% yoy seiring dengan belanja pemerintah dan investasi yang lemah. Bahkan terdapat kekhawatiran kapasitas utilisasi sektor industri kembali pada level sebelum krisis 2008 yang relatif rendah. (Rasyid, 2013)

Perekonomian Rusia mulai anjlok ketika Juni 2014, saat harga minyak turun separo akibat dampak sanksi-sanksi yang dikenakan Barat terhadap Rusia terkait dengan perang di Ukraina dan karena Organisasi Negara-Negara Eksportir Minyak Tambang (OPEC) menolak mengurangi pemangkasan volume produksinya. Pertemuan OPEC pada 27 November 2014 memutuskan untuk tidak menurunkan produksi minyak dari posisi 30 juta bph, pasca keputusan OPEC tersebut harga minyak turun sebanyak 7,21 persen menjadi sama dengan rekor tahun 2010. (Rusia, 2014) Secara rata-rata, rubel mengalami depresiasi sebesar 21,2% terhadap dolar AS pada 2014, sedangkan secara *point to point* pelemahan itu mencapai 84,8%. Jika dilihat lebih detail, kejatuhan nilai tukar rubel terutama terjadi pada pertengahan bulan lalu, yang mana sempat terjadi depresiasi sebanyak hampir 22% hanya dalam jangka waktu tiga hari (12–16 Desember 2014). (Laporan Perekonomian Dan Perbankan, 2015)

Menilik dari perekonomian Rusia yang semakin terguncang akibat embargo ditambah dengan turunya harga minyak dunia tersebut memaksa Pemerintah Rusia untuk menerapkan aturan di dalam negeri Rusia sendiri, sebagai langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Rusia dengan pertimbangan yang matang. Aturan yang di terapkan oleh Rusia pada sisi internal negaranya sendiri tersebut dikeluarkan sebagai respon dari kondisi perekonomian Rusia yang goyah dan embargo dari Amerika Serikat.

3.1 KEBIJAKAN RUSIA DALAM SEKTOR DALAM NEGERINYA :

Rusia menerapkan kebijakan dalam sector ekonomi di dalam negerinya guna mengembalikan perekonomiannya yang terguncang akibat embargo yang di berikan oleh Amerika Serikat serta naiknya harga minyak dunia. Pengketatan aturan pada sector ekonomi Rusia ini merupakan suatu langkah jitu yang diambil Rusia, selain memperkuat sector perekonomiannya yang goyah akibat embargo dan turunya harga minya dunia, kebijakan ini di buat oleh Rusia sebagai suatu cara

untuk sedikit demi sedikit melepaskan ketergantungannya kepada Amerika Serikat, serta sebagai upaya Rusia untuk membalas embargo yang di berikan oleh Amerika Serikat dalam sector ekonomi : rencana penggantian Dolar kedalam Rubel dan Yuan, tutupnya perusahaan AS di Rusia (Google, McD, dan Cocacola), larangan penggunaan motor roket Rusia oleh AS, larangan impor produk pertanian dari AS, menerapkan Rubel sebagai mata uang nasional Krimea, dan menggunakan UnionPay sebagai pelengkap MasterCard atau visa.

Selain memberlakukan aturan dalam sector ekonominya, Rusia juga mengeluarkan dalam sector social, dimana Rusia dalam kebijakannya terlihat ingin membatasi masyarakatnya untuk melakukan hubungan dengan Amerika Serikat, karena dinilai justru akan mengancam keselamatan mereka. Rusia pun melarang warganya untuk berpergian keluar negeri terutama di negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat. Kemudian Rusia juga menempatkan aturan dengan melarang pejabat Amerika Serikat untuk masuk ke dalam wilayah Rusia, hal tersebut di lakukan oleh Rusia selain bertujuan untuk membalas sanksi Amerika Serikat yang memberlakukan larangan Visa dan pembekuan aset bagi pengusaha Rusia, hal tersebut dilakukan oleh Rusia untuk menjaga wilayahnya dari masuknya orang asing yang berasal dari negara lawannya tersebut. Beberapa pejabat yang di larang untuk berpergian ke Rusia adalah: Caroline Atkinson, Daniel Pfeiffer, Benjamin Rhodes, Jhone Boehner, Harry Reid, Jhon McCain, Robert Menendez, Marry Landrieu, dan Dan Coast.

3.2 Kerjasama Rusia dengan Negara lain :

Amerika Serikat memanfaatkan ketergantungan Rusia terhadap aspek perdagangan dengan Uni Eropa dengan berkoalisi bersama Uni Eropa untuk memberikan sanksi terutama dalam sector ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar melemahkan Rusia di sektor ekonominya, dan mempersempit mitra dagang Rusia. Selama lebih dari 40 Uni Eropa menjadi konsumen yang paling penting bagi Rusia. Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar Rusia, terutama dalam sector gas alamnya. Separuh gas dan sepertiga minyak yang dipakai oleh Negara - negara di Uni Eropa berasal dari Rusia. Volume perdagangan Rusia dengan Uni Eropa lebih dari 400 miliar, Rusia mengirimkan antara 130 dan 140 miliar meter kubik gas ke Eropa dan memasok sekitar 200 miliar ton minyak, yang berarti bahwa ini adalah pasar yang sangat penting bagi pasar Rusia. (Eropa, 2009) Rusia telah menjalin kerjasama perdagangan dengan Uni Eropa selama lebih dari 40 tahun.

Pemerintah Rusia melalui pertimbangan yang matang menerapkan strategi untuk mencari kawan guna meningkatkan perekonomiannya yang sempat terperosok akibat embargo Amerika Serikat dan Uni Eropa dengan mempererat kerjasama dengan negara yang tidak turut serta memberi sanksi kepada Rusia terkait krisis yang terjadi di Krimea ini.

Negara-negara pencetus sanksi internasional kepada Rusia ternyata salah menduga bahwa Moskow tidak akan memiliki banyak pilihan alternatif dalam menghadapi "isolasi" dunia. Moskow justru memiliki banyak pilihan yang tak terbatas. Berbagai mitra potensial dapat ditemukan, terutama di antara negara-negara yang skeptis terhadap Eropa dan Amerika Serikat. Moskow tidak hanya mencari mitra-mitra baru di dataran Eropa dan Amerika Saja saja. Sejumlah upaya intensif dikerahkan untuk dapat memperoleh kemajuan di Asia dan di Timur Tengah. (Capai Kesepakatan Dengan Mitra Baru Pengganti Barat, 2015) Diwilayah Asia, Rusia mulai menjalankan kerjasama dengan Indonesia dan Tiongkok, pada wilayah Amerika Latin, Rusia mendekati Kuba dan Argentina, di wilayah Timur Tengah, Rusia menggandeng Mesir dan Iran, sedangkan pada wilayah Eropa, Rusia menerapkan kerjasama dengan negara Turki dan Hungaria. Pasca buruknya hubungan Rusia dan Uni Eropa akibat krisis Krimea ini, menjadikan Rusia tidak lagi melihat Uni Eropa sebagai kesatuan negara, tetapi dilihat secara individual.

Kesimpulan :

Sanksi ekonomi yang di berikan oleh Amerika Serikat ternyata semakin lama cukup mampu menjatuhkan Rusia, dimana nilai tukar 37 rubel setara dengan 1 dollar AS, akibat dolar menguat serta turunnya harag minyak dunia ini menyebabkan ekonomi Rusia makin terpuruk. Hal ini lah yang kemudian memaksa Rusia untuk berfikir bagai mana menyikapi keterpurukan ekonomi yang kini menyimpannya tersebut. Sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat ini pada dasarnya bertujuan untuk membatasi bahkan mematikan pasar Rusia khususnya di wilayah Eropa. Rusia pun membentuk strategi untuk keluar dari kondisi buruk ini, kemudian ia mencoba mencari mantra baru dalam perdagangan.

Kesimpulan dari strategi yang dilakukan oleh Rusia menghadapi embargo ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah dengan menggunakan alternatif lain pengganti dolar yaitu menggunakan rubel atau pun dolar, bebrapa perusahaan dan bank sudah melakukan hal tersebut,warga Rusia pun sudah mulai menukar valuta asing yang mereka miliki kedalam

bentuka yuan, hal ini mereka lakukan karena takut kesulitan dalam beroprasional akan terjadi bila masih menggunakan dolar.

Kemudian strategi yang dilakukan oleh Rusia adalah melakukan kerja sama dengan negara – negara yang tidak turut mengembargonya, selain kerjasama tersebut di buat untuk menstabilkan ekonomi Rusia yang anjlok akibat sanksi Amerika Serikat, upaya kerjasama ini juga sebagai suatu langkah Rusia untuk mencari kawan, agar tidak merasa terisolasi, diantaranya negara tersebut ialah: Tiongkok, Indonesia, Mesir, Iran, Hungaria, dan Turki. Beberapa kerjasama yang dilakukan dengan negara – negara tersebut merupakan kerjasama yang dala sector yang mendapat sanksi dari Amerika dan negara lain, contohnya jual beli minyak, transfer teknologi, dan jual beli produk pertanian.

Rusia juga melakukan pengetatan aturan di sector dalam negeri Rusia pasca referendum seperti memberlakukan aturan yang memberatkan perusahaan milik Amerika Serikat yang berada di wilayah ini sehingga mengakibatkan beberapa perusahaan milik Amerika Serikat ini harus tutup, seperti Mcd, Cocacola, dan Google. Rusia juga melarang warga negaranya untuk berpergian ke luar negri, serta balas menerapkan sanksi larangan perjalanan bagi petinggi Amerika Serikat.

Refrensi :

Dampak Sanksi Baru Bagi Bank Rusia. (2014, Agustua Selasa). Retrieved September Senin, 2015, from http://indonesia.rbth.com/politics/2014/08/02/dampak_sanksi_baru_as_bagi_bank_rusia_24601.

OSCE Sending Military Observer Mission to Ukrine. (2014). Retrieved Oktober 2015, 27, from <http://news.yahoo.com/osce-sending-military-observer-mission-ukrine-185935506.html>.

Balmforth, R. (2013, Desember 12). *Kiev protesters gather, EU dangles aid promise.* Retrieved Maret rabu, 3, from <http://www.reuters.com/article/2013/12/12/us-ukraine-idUSBRE9BA04420131212>.

Capai Kesepakatan Dengan Mitra Baru Pengganti Barat. (2015, Maret). Retrieved November 2015, from http://indonesia.rbth.com/politics/2015/03/13/capai_kesepakatan_dengan_mitra-mitra_baru_pengganti_barat_rusia_tunj_27077.

Davydov, I. (2008). *The Crimean Tatars and Their Influence on the 'Triangle of Conflict' — Russia-Crimea Ukraine.* California: Thesis Naval Postgraduate School, Monterey Californi.

Document Security Council No. SC/11302, S. C. (2014). *Document Security Council No. SC/11302, Security Concil 7124th Meeting, "Ukraine In Emergency Meeting, Calls ON Security Council To Top Military*

Intervention By Russian Federation. Retrieved Agustus Jumat, 2014, from <http://www.un.org/News/Press/Docs//2014/sc11302.doc.html>.

Eropa, R. T. (2009). *Rusia Tertarik Kembangkan Kerjasama dengan Uni Eropa*. Retrieved Oktober 2015, from <http://www.antaranews.com/berita/454609/rusia-tertarik-kembangkan-hubungan-dengan-uni-eropa>.

EU sanctions list includes Russian commanders, Crimea PM, Reuters. (2013, Maret). Retrieved Oktober jumat, 2015, from <http://www.reuters.com/article/2014/03/17/eu-russia-sanctions-idUSB5N0LP01720140317#AsumpZxvTJVodkld.99>.

General Language Crimea. (2001, April Rabu). Retrieved Oktober Sabtu, 27, from <http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/language/Crimea/>.

Ketika Ukraina Harus Memilih Antara Rusia dan Uni Eropa. (2014, september). Retrieved Desember Kamis, 2014, from http://indonesia.rbth.com/politics/2013/12/19/ketika_ukraina_harus_memilih_antara_rusia_dan_uni_eropa_22933.html.

Kompas. (2014). *Rubel Rusia Langsung Rontok Semua Indikator Finansial Kremlin Merosot*. Jogjakarta: kompas.

Krimea, K. S. (2014). *Kriseis Semenanjung Krimea*. Retrieved Oktober sabtu, 2015, from <http://nasional.sindonews.com/read/841394/18/krisis-semenanjung-crimea-1394002513>.

Krimea, L. F. (2014, Oktober selasa). *Lima Fakta Kunci Tentang Krimea*. Retrieved September Selasa, 16, from <http://www.antaranews.com/berita/422113/lima-fakta-kunci-tentang-krimea>.

Kuncahyono, T. (2014). Kompas. *Krisis Ukraina, Malaikat Dari Crimea*, 12.

Laporan Perekonomian Dan Perbankan, d. L. (2015, Januari). *Laporan Perekonomian Dan Perbankan, dari Lembaga Simpan Pinjam*. Retrieved September 2015, from lps.go.id/.../2015...Perekonomian+dan+Perbankan+Januari+2015.../c38d3603-2122-497a-ba6a-a2952f5c9632.

Maghris, C. (2014). *Aneksasi Krimea Oleh Rusia*. *Aneksasi Krimea Oleh Rusia*, 20.

Mas'ood, M. (1989). *Studi Hubungan-Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: Pusat antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.

Organization For Security and Cooperation in Europe, "OSCE respons to crisis in and around Ukraine. (2014). Retrieved 2015, from <http://www.osce.org/ukrainemonitoring>.

Public Opinion Survey Residents of the Autonomous Republic of Crimea. (2013, Mei Sabtu). Retrieved Oktober Selasa, 2014, from

<http://www.iri.org/sites/default/files/2013%20October%207%20Survey%20of%20Crimean%20Public%20Opinion,%20>

Rasyid, A. A. (2013). Jeratan Deflasi Kawasan Euro. *Jeratan Deflasi Kawasan Euro* , p. 8.

Rusia, A. G. (2014, Agustus). *Akibat Global Sanksi Terhadap Rusia*. Retrieved September 2015, from <http://vovworld.vn/id-ID/Ulasan-Berita/Akibat-global-dari-sanksisanksi-terhadap-Rusia/303358.vo>.